

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku – buku, artikel – artikel, laporan penelitian / kajian dan makalah – makalah

Biro Pusat Statistik (BPS)., 1998, *Statistik Pembangunan Perumahan Indonesia (Housing Construction Statistics in Indonesia)*, BPS Pusat, Jakarta.

Biro Pusat Statistik (BPS)., 2001, *Kabupaten Sleman Dalam Angka*, Kerjasama BPS dan Bappeda Kabupaten Sleman, Jogjakarta.

Budihardjo., 1992, *Sejumlah Masalah Permukiman Kota*, Alumni, Bandung

Hakim, A., 1999, *Perlindungan Konsumen Dalam Bisnis Properti Bidang Perumahan di Ujung Pandang*, Tesis Magister Hukum UGM, Jogjakarta..

Nasution, AZ., 1995, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Nurmardjito., 2000, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Konsumen dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas*, dalam H. Syawali dan N.S.Imaniyati : *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.

Shidarta., 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.

Shofie Y., 2000, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen - Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti,Bandung.

Subekti., 1996, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Sudaryatmo., 1999, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sulistyowati., 1992, *Akses Kepada Perlindungan Konsumen Sebagai Salah Satu Aspek Kesejahteraan Sosial (Suatu Tinjauan Sosial terhadap Hukum)*,Universitas Indonesia, Jakarta.

Widijantoro., 1999, *Dari Tradisi Hukum Caveat Emptor Menuju Product Liability Mengenai Hak dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Berdasarkan UUPK*, Sosialisasi UUPK di Kanwil Depperindag DIJ, Jogjakarta.

Widjaja G dan Yani A., 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

## 2. Media Massa.

Kompas 8 April 2002., “Pencairan Dana KPRS/RSS Jangan Sampai Terlambat Lagi”, hal. 15

## 3. Peraturan Perundang – undangan.

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

\_\_\_\_\_, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman*

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.*

Kantor Menteri Negara Perumahan Rakyat, *Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah*